

Pola Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng

Suhasran

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: suhasranhasan@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas kehidupan, pola kerukunan, dan pendukung kerukunan umat beragama di Kabupaten Soppeng. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, berupa deskripsi tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Soppeng menggunakan beberapa pendekatan mulai pendekatan sosiologi, teologi, dan fenomenologi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan memberikan daftar pertanyaan kepada informan berjumlah 20 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan realitas kehidupan umat beragama di Kabupaten Soppeng melihat kerja sama dan kegiatan yang sering dilakukan bersama antar umat beragama di Kabupaten Soppeng, pola kerukunan umat beragama di Kabupaten Soppeng dan bentuk kerja sama yang sering dilakukan yaitu mengadakan pertemuan antar tokoh umat beragama untuk membicarakan kerukunan dan meningkatkan keharmonisan antar umat beragama, serta faktor pendukung terjadinya kerukunan umat beragama di kabupaten Soppeng merupakan salah satu pondasi untuk menjaga kerukunan umat beragama dan keharmonisan masyarakat, adanya saling mengerti saling memahami satu sama lain sehingga terjalinnya komunikasi interaksi dan kerja sama bisa berjalan dengan baik, kerukunan umat beragama bisa berjalan dengan semestinya harus saling memahami, adanya pemahaman tentang kerukunan merupakan jalan terjadinya kedamaian di antara masyarakat yang berbeda keyakinan. Kerukunan umat beragama yaitu kesediaan menerima perbedaan dengan menumbuhkan sikap saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam pengalaman ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : *Sinkretisme, Kultur Kedaerahan, Multidimensional, Toleransi*

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, baik dalam skop nasional maupun daerah. Kemejemukan itu sifatnya *multidimensional*, ada yang di timbulkan oleh perbedaan suku, tingkat sosial, pengelompokan organisasi politik, agama, dan sebagainya.¹

Kerukunan Hidup Umat beragama secara formal muncul sejak diselenggarakan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 November 1967 oleh pemerintah dan berlangsung di gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta. Diadakannya Musyawarah Antar Agama tersebut karena pada saat itu timbul berbagai ketegangan antar berbagai agama terutama antara Islam dan Kristen/ Katolik di beberapa daerah, yang jika tidak segera diatasi akan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal itu tampak jelas seperti yang di sampaikan oleh (Pejabat) Presiden Soeharto dalam sambutan beliau pada pembukaan musyawarah tersebut. Presiden Soeharto dalam Musyawarah tersebut juga memberikan pokok-pokok pikiran yang mendasar tentang perlunya tata cara atau dapat dianggap sebagai pokok-pokok kode etik penyiaran agama, dan keharusan mematuhi ketentuan hukum dan segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Memegang prinsip bahwa ajaran setiap agama, sikap toleransi merupakan ciri kepribadian bangsa Indonesia, dorongan hasrat kolektif untuk bersatu; situasi Indonesia sedang berada dalam era pembangunan maka toleransi yang di maksud dalam pergaulan antarumat beragama bukanlah toleransi statis yang pasif, melainkan toleransi dinamis yang

¹M. Ato Mudhzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 127.

²Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pulitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h. 2-3.

aktif. Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerja sama. Bila pergaulan antarumat beragama hanya dalam bentuk statis, maka kerukunan umat teoritis melahirkan toleransi semu. Dibelakang toleransi semu berselimut sikap hipokritis, sehingga tidak membuahkan sesuatu yang di harapkan bersama, baik oleh pemerintah atau oleh masyarakat sendiri. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan kerja sama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan umat beragama, bukan dalam bentuk teoritis, melainkan sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai suatu bangsa.³

Nabi Muhammad saw tidak menghalangi untuk mengembangkan sikap-sikap toleransi antar pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda meskipun berada ditengah-tengah pluralitas keberagamaan. Bahkan Nabi Muhammad saw. yang menjadi suri tauladan yang sangat menginspirasi para pengikutnya dalam hal toleransi antara agama, antar umat beragama, juga antar agama dan keyakinan yang berbeda.⁴

Indonesia dengan mayoritas penduduk Umat Islam harus mampu member contoh pada umat agama lain bahwa teologi eksklusivis bagaikan tanaman asing tidak senyawa dengan bumi Indonesia. Pengalaman *Harttford Seminary* dalam menciptakan suasana dialogis dan saling member kearifan antara umat Kristen dan Islam sungguh sangat berguna untuk disimak bersama dan dipetik buahnya. Hampir tiap orang, baik yang masih bersahaja ataupun yang sudah maju, menurut fitrahnya percaya kepada adanya Tuhan yang menciptakan Alam, meskipun tidak sama dalam menyebutkan namaNya dan dalam menggambarkan sifat-sifat yang dimiliki- Nya. Dengan

³H.said Aqil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Cet.2;Jakarta; Ciputat Press, 2003), h. 16.

⁴Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 7.

perkataan lain, beragama, dimana esensinya yang utama dan terpenting ialah percaya kepada Tuhan. Tugas Rasul-rasul Tuhan bukan untuk menciptakan perasaan dan fitrah beragama, sebab fitrah ini sudah ada pada diri manusia, malainkan mereka memberikan tuntunan dan menjuruskan fitrah tersebut kepada jalan dan tujuan yang sebenarnya. Karena itu Quran mendasarkan da'wahnya kepada fitrah dan dalam ajakanya selalu menggunakan cara yang bisa menghidupkan, memperkembangkan, menguatkan dan memperbaiki fitrah tersebut.⁵

Setiap Agama diturunkan bagi manusia dengan berbagai keadaan psikologis dan spiritual yang berbeda-beda. Oleh Karena itu, agama mesti mengandung kemungkinan bagi penafsiran yang berbeda pula. Kandungan berbagai model penafsiran atas satu kebenaran, menjadikan agama mampu menggabungkan keanekaragaman ke dalam suatu kesatuan dan menciptakan per model penafsiran atas satu kebenaran, maka agama akan mampu menggabungkan keanekaragaman ke dalam suatu kesatuan dan menciptakan peradaban yang agamis.⁶

Sejarah mencatat bahwa Nabi pernah dikucilkan dan pernah diusir dari daerah kelahirannya (*Makkah al-Mukarramah*). Beliau melakukan hijrah ke madinah untuk beberapa lama dan kemudian kembali ke Makkah. Peristiwa *Fath Makkah*. Peristiwa yang penuh kemenangan, Nabi tidak mengambil langkah balas dendam kepada siapapun juga yang telah mengusirnya dahulu dari tanah kelahirannya. Peristiwa tersebut memberi kesan mendalam terhadap penganut agama Islam dimanapun mereka berada. Nabi telah member contoh konkret dan contoh pemahaman dan penghayatan kerukunan keagamaan yang

⁵Manafi, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna), h. 22-23.

⁶Siti Maryam, *Damai dalam Budaya*, (Cet.1; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 17.

sangat nyata di hadapan umatnya. Ketika sesampainya di Kota Madinah yang sangat plural kondisi penduduknya, baik pluralitas agama, kepercayaan maupun kesukuan, Nabi Muhammad saw. membuat suatu dokumen konstitusi Madinah atau Piagam Madinah sebagai aturan pokok tata kehidupah bersama di Kota Madinah.⁷

Sinkretisme adalah paham atau aliran yang merupakan perpaduan dari beberapa paham yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan dan sebagainya.⁸ Sinkretisme menganggap bahwa semua agama itu benar, tidak sesuai dan tidak relevan dengan keimanan seorang muslim serta tidak relevan dengan pemikiran yang logis, meskipun dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan Islam sangat mengedepankan prinsip toleransi atau kerukunan antar umat beragama.

Winter menegaskan pendapatnya bahwa” untuk memahami masyarakat dengan segala hal yang berkait denganya, pemahaman terhadap agama yang dianut oleh masyarakat dalam suatu komunitas perlu dan bahkan sangat penting”. Hal ini disebabkan oleh karena antara agama dan struktur sosial masyarakat saling mempengaruhi. Pada sisi ini, ada dua hal yang perlu diamati,yaitu pengaruh agama terhadap struktur sosial dan pengaruh struktur sosial atas kepercayaan dan amalan-amalan keagamaan.⁹Agama merupakan intisari kehidupan manusia. Orang yang mengenal intisari yang akan menemukan hakikat kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaan yang tidak didasari atas nilai-nilai agama adalah kebahagiaan semu, sesaat danberujung pada

⁷Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press ,2001), h.7.

⁹Winter dalam Samiang Katu dkk, *Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi (Ihaktiar memahami agama dan menghalindari Konflik)*(Makassar: Alauddin Press 2009), h. 3.

sebuah kejenuhan.¹⁰

Kabupaten Soppeng adalah daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai kerukunan, walaupun mereka hidup dalam berbeda agama, namun mereka mampu untuk menghormati satu sama lain, saling menghargai dan menyayangi, bekerjasama dalam membangun kerukunan di Kabupaten Soppeng, satu hal yang menarik dalam kerukunan umat beragama di Kabupaten Soppeng yaitu semua rumah ibadah berdekatan dan masyarakat yang berada di sekitar rumah ibadah tersebut tidak merasa terganggu pada saat umat agama lain melaksanakan ibadahnya, masyarakat di daerah tersebut tidak pernah merasa terganggu adanya perbedahan.

Hal inilah yang tercermin dalam tingkah laku keberagaman aqidah yang terjadi di Kabupaten Soppeng khususnya. Kegiatan dan aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat tidak menggambarkan adanya ketimpangan dalam berinteraksi meskipun berbeda keyakinan. Toko-toko yang berdiri tegak membentengi kota Soppeng didominasi oleh kepemilikan non-muslim, namun yang mengunjungi dan membanjiri tokoh tersebut adalah orang muslim. Misalnya pada toko Ahing penjual kopi yang berdiri puluhan tahun yang lalu. Pemiliknya beragama Kristen Protestan namun pengunjungnya mulai pagi sampai larut malam pengunjungnya adalah umat Islam. Ini yang menggambarkan adanya suatu kerukunan yang harmonis dalam kehidupan sosial di Kabupaten Soppeng. Kondisi Sosial tersebut menjadi alasan penelitian tentang "Pola Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Soppeng".

¹⁰Samiang Katu dkk, *Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi (Ihalktiar mem ahalami agama dan menghalindari Konflik*, h.1.

B. Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan sosiologi, teologi, dan fenomenologi. Pendekatan sosiologi dalam memahami agama diketahui bahwa sosiologi merupakan ilmu yang membahas sesuatu yang telah teratur dan terjadi secara berulang dalam masyarakat. Pendekatan teologi dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normative yakni seseorang akan memiliki sikap militansi dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada agama yang diyakininya sebagai yang benar tanpa memandang dan meremehkan agama lainnya.¹¹ Adapun pendekatan fenomenologi sering digunakan untuk merujuk ke semua obyek yang masih dianggap eksternal dan secara paradigmatic harus disebut obyektif (dalam arti belum menjadi subyektifitas konseptual manusia). Fenomenologi adalah gejala dalam situasi alamiah yang kompleks yang hanya mungkin menjadi bagian dari alam kesadaran manusia.¹²

Bagian terpenting dari pendekatan tersebut adalah pada saat proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dipilih pada penelitian ini yakni observasi partisipatif. Peneliti mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, mempertanyakan kepada informan yang menarik dan mempelajari dokumen yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yakni peneliti mengunjungi langsung kerumah atau tempat tinggal tokoh masyarakat dan tokoh agama atau orang yang akan diwawancarai untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang perlu ditanyakan dan untuk memahami pola-pola kerukunan umat beragama di Kabupaten Soppeng

¹¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h.33-35.

¹²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), h. 19.

maka teknik yang di gunakan adalah teknik wawancara tidak berstruktur atau wawancara mendalam (*indepth interview*)¹³. Selain itu, dokumentasi merupakan pengumpulan data pada penelitian ini yakni penulis menggunakan kamera dan alat tulis untuk membantu mengumpulkan data-data secara akurat untuk menghindari kesalahan penyusunan dalam hasil penelitian.

1. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Soerjono Soekanto mendefinisikan Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.¹⁴ Simell Veegar menyatakan bahwa bila ada dua orang atau lebih melakukan kontak hubungan yang dilandasi oleh aturan-aturan atau pola-pola tingkah laku yang diakui bersama, maka proses interaksi mereka akan menciptakan kelompok sosial yang disebut masyarakat.¹⁵ Mengemukakan bahwa interaksi sosial diartikan sebagai hubungan antara dua orang atau lebih, dan atau dua kelompok, lebih atas dasar adanya aksi dan reaksi.¹⁶

Gillin dan Dirdjosiswo, Soedjono menyatakan bahwa interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan antara orang-orang yang secara individual, antar kelompok orang, dan orang perorangan dengan kelompok.¹⁷

Sedangkan menurut paradigma fakta sosial kehidupan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D* (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 2003.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. 43; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 55.

¹⁵ Veegar K.J, *Realitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1983), h. 70.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia), h.33.

¹⁷ Gillin dan Gillin dalam Dirdjosiswo, Soedjono, *Asas-asas Sosiologi* (Bandung: Armico, 1985), h. 58.

masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Jika masyarakat dilihat dari struktur sosialnya tentulah memiliki seperangkat aturan yang secara analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu warga masyarakat, akan tetapi dapat mempengaruhi perilaku kesehariannya. Kehidupan sosial manusia merupakan kenyataan (fakta) tersendiri yang tidak mungkin dapat dimengerti berdasarkan ciri-ciri personal individu semata. Parson percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri suatu sistem Adaptasi (*Adaptation*).¹⁸ Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), Integrasi (*Integration*), Latensi (*Latency*) Pemeliharaan pola atau disebut dengan AGIL, agar bertahan hidup ada empat sistem fungsi yang harus dijalani yaitu:

1. Adaptasi (*Adaptation*): sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan. Dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan (*Goal Attainment*): sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.
3. Integrasi (*Integration*): sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (AGL).
4. Latensi (*Latency*) Pemeliharaan pola. Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

¹⁸ IB. Wirawan, *Teori-Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada 2012),h. 54.

5. Parson juga mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level sistem teoritisnya. Dalam pembahasan dibawah ini tentang keempat sistem tindakan, bagaimana Parsons menggunakan AGIL.¹⁹

Parson juga mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level sistem teoritisnya. Dalam pembahasan dibawah ini tentang keempat sistem tindakan, bagaimana Parsons menggunakan AGIL.

1. *Organisme behavioral* (perilaku) adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mengubah dunia luar atau lingkungannya sesuai dengan kebutuhan. *Sistem kepribadian* menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan mobilitasi (menggerakkan) segala sumber daya yang digunakan untuk pencapaiannya.
2. *Sistem Sosial* menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya (pembentuk masyarakat). Akhirnya sistem kultural menjadi yang menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.²⁰

Oleh karena itu, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Kontak sosial yaitu aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki arti (makna) bagi sipelaku

¹⁹George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir, Teori Sosial Post Modern*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2012),h. 257.

²⁰George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana 2012),h. 259-261.

dan sipenerima membalas aksi tersebut dengan reaksi.²¹

2. Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu.²²

2. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

1. Proses Sosial Asosiatif

Proses sosial yang asosiatif adalah proses sosial yang didalam realitas sosial anggota-anggota masyarakatnya dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Harmoni sosial ini menciptakan kondisi sosial yang teratur atau disebut *social order*. Jika anggota masyarakat dalam keadaan mematuhi tata aturan ini, maka pola-pola harmoni sosial yang mengarah pada kerjasama antar-anggota masyarakat akan tercipta. Adapun dalam proses-proses sosial yang asosiatif dibedakan menjadi:

a. Kerja sama (*cooperation*)

Kerjasama terbentuk karena menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya terdapat empat bentuk kerjasama, yaitu *bargaining* (tawar-menawar), *co-optation* (kooptasi), *coalition* (koalisi), dan *joint-venture* (usaha patungan).²³

1. *Bargaining*, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang jasa-jasa antara dua organisasi

²¹Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*, h. 74.

²²Abulsyani, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial* (Cet. I; Jakarta: Fajar Agung, 1987), h. 47.

²³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 72-75.

atau lebih.

2. Ko-optasi (*co-optation*), yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
3. Koalisi (*coalition*), yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan bersama.
4. *Joint-venture*, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya, pemboran minyak, pertambangan batu-bara, perfilman, perhotelan, dan seterusnya.

b. Akomodasi (Accommodation)

Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan, dimana terjadi suatu keseimbangan dalam interaksi antara individu-individu atau kelompok manusia yang berkaitan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Proses akomodasi dibedakan menjadi beberapa bentuk:

1. *Coercion*, adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan.
2. *Compromise*, adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.
3. *Arbitration*, adalah suatu cara untuk mencapai compromise apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri.
4. *Mediation* hampir menyerupai *arbitration*. Pada mediation diundang pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada. Pihak ketiga tersebut tugasnya adalah untuk

utamanya mengusahakan suatu penyelesaian yang damai.

5. *Conciliation*, adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.
6. *Toleration*, merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya.
7. *Stalemate*, merupakan suatu akomodasi, dimana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya.
8. *Adjudication*, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.²⁴

c. Asimilasi (Asimilation)

Asimilasi merupakan proses sosial dimana pihak-pihak yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok.²⁵

d. Akulturasi

Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri.²⁶

e. Proses Sosial Disosiatif

²⁴SoerjonoSoekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 68-71.

²⁵Asih Suroso, S. Gunawan, *Aspirasi Sosiologi* (Surakarta: CV Pustaka Manggala, 2006), h. 51.

²⁶Jabal Tarik Ibrahim, *Sosiologi Pedesaan* (Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003), h. 81.

Proses sosial disosiatif adalah keadaan realitas sosial dalam keadaan disharmoni sebagai akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat.²⁷

f. Persaingan (*Competition*)

Persaingan atau kompetisi adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik dipihak lawannya.

- 1) Persaingan ekonomi, persaingan dibidang ekonomi timbul karena terbatasnya persediaan apabila dibandingkan dengan jumlah konsumen.
- 2) Persaingan kebudayaan, persaingan dalam kebudayaan terjadi ketika patra pedagang Barat berdagang di pelabuhan-pelabuhan Jepang atu sewaktu pendeta-pendeta agama Kristen meluaskan agamanya di Jepang.
- 3) Persaingan kedudukan dan peranan, di dalam diri seseorang maupun di dalam kelompok terdapat keinginan-keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan yang terpandang.
- 4) Persaingan ras, sebenarnya juga merupakan persaingan di bidang kebudayaan.

g. Kontravensi

Kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada diantara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan seperti perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi,

²⁷Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*, h. 87.

dan intimidasi yang ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik. Bentuk-bentuk kontravensi diantaranya: (1)Perbuatan pellawanan, penolakan, dan lain-lain; (2)Menyangkal pernyataan orang lain di muka umum; (3)Melakukan penghasutan; (4)Berkhianat; (5)Mengejutkan lawan-lawan, dan lain-lain; dan (6)Konflik (*conflict*).

Konflik merupakan proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial diantara mereka yang bertikai tersebut.²⁸ Adapun bentuk-bentuk konflik/pertentangan antara lain: (1) Pertentangan pribadi, tidak jarang terjadi bahwa dua sejak mulai berkenalan sudah saling tidak menyukai. Apabila permulaan buruk tadi dikembangkan, maka timbul rasa saling benci; (2) Pertentangan rasial, dalam hal ini pun pihak akan menyadari betapa adanya perbedaan-perbedaan antara mereka yang seringkali menimbulkan pertentangan; (3)Pertentangan antara kelas-kelas sosial, pada umumnya pertentangan ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan misalnya kepentingan antara majikan dan buruh; (4)Pertentangan politik, biasanya pertentangan ini menyangkut baik antara golongan-golongan dalam satu masyarakat, maupun antara negara-negara yang berdaulat; (5)Pertentangan yang bersifat internasional, ini disebabkan karena perbedaan-perbedaan kepentingan yang kemudian merembes ke kedaulatan negara.²⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep interaksi

²⁸J. SwiNarwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Edisi ke-Empat, Cet. Ke-5; Jakarta: Kencana, 2011), h. 65-71.

²⁹SoerjonoSoekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 95.

sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik berbentuk asosiatif maupun disosiatif. Pada masyarakat yang heterogen dari segi agama, penggunaan agama sebagai sistem acuan nilai, dapat mengarah kepada konflik dan disintegrasi sosial, kecuali apabila masing-masing umat beragama dapat mengembangkan penafsiran keagamaannya yang mempertemukan kesamaan yang terdapat pada masing-masing sistem acuan.

Problem utama masyarakat yang menggunakan agama sebagai sistem acuan nilai yang relative dominan seperti di temukan di Indonesia, terletak pada kemampuan masyarakat tersebut menemukan mekanisme sosial tertentu, baik secara alamiah maupun terencana, yang dapat menjamin tertib hukum dan sosial. Salah satu bentuk mekanisme sosial yang diusahakan secara terencana, telah dilakukan oleh pemerintah melalui pengembangan pola kerukunan, seperti mendorong pembentukan majlis agama-agama, membentuk wadah kerukunan antar umat beragama, mengembangkan kesepahaman di antara pemimpin dan tokoh agama melalui berbagai pertemuan dan kontak antar pribadi, serta mengembangkan perangkat peraturan yang berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya penggunaan agama sebagai sistem acuan hingga ke tingkat konflik.³⁰

Agama dilihat sebagai gejala sosial yang dicerminkan oleh adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh para penganutnya, maka agama mempunyai berbagai fungsi. Bermula dari pemikiran-pemikiran Durkheim, para ahli sosiologi melihat sedikitnya ada lima fungsi sosial agama, yaitu:

³⁰Departemen Agama RI, *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama Indonesia, Seri II* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), h. 125.

a. Fungsi solidaritas sosial

Agama berfungsi sebagai perekat sosial dengan menghimpun para pemeluknya untuk secara teratur melakukan berbagai ritual yang sama dan memperlengkapi mereka dengan nilai-nilai yang sama yang di atasnya dibangun suatu komunitas yang sama.

b. Fungsi pemberian makna hidup

Agama menawarkan suatu theodicy yang mampu memberikan terhadap persoalan-persoalan ultimate dan eternal yang dihadapi manusia mengenai keberadaannya dunia ini. Dengan fungsi ini, agama mengajarkan bahwa hiruk-pikuk kehidupan di dunia ini mempunyai arti yang lebih panjang dan lebih dalam dari batas waktu kehidupan di dunia sendiri, karena adanya kelanjutan hidup di akhirat kelak.

c. Fungsi kontrol sosial

Nilai-nilai dan norma-norma yang penting dalam masyarakat dipandang mempunyai daya paksa yang paling kuat dan lebih dalam apabila juga disebut dalam kitab-kitab suci agama. Menurut fungsi ini, bagi pemeluk suatu agama maka nilai dan norma agamanya itu akan membantu memelihara control sosial dengan mengendalikan tingkah laku seharusnya.

d. Fungsi perubahan sosial

Agama memberikan inspirasi dan memudahkan jalan terjadinya perubahan sosial. Nilai-nilai agama memberikan standarisasi moral mengenai bagaimana sejumlah pengaturan masyarakat yang ada itu harus diukur dan bagaimana seharusnya.

e. Fungsi dukungan psikologi

Agama memberikan dukungan psikologi kepada

pemeluknya ketika ia menghadapi percobaan atau kegoncangan hidup. Pada saat goncang seperti kematian anggota keluarganya, agama menawarkan sejumlah aturan dan prosedur yang sanggup menstabilisasikan kehidupan jiwanya. Bukan hanya dalam sosial kematian dan kesedihan, dalam siklus kehidupannya lainya pun yang lebih mengembirakan seperti kelahiran dan perkawinan, agama menawarkan cara imbang dalam menghadapinya.

Fungsi sosial agama tersebut pada dasarnya berkisar pada pola hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia yang diatur oleh tiga hal, yaitu sistem kepercayaan, ritual dan norma tingkah laku. Dan pola-pola hubungan sosial yang dilakukan oleh umat yang berbeda agama, ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat *negative*.³¹

Indonesia adalah sebuah bangsa yang komposisi etnisnya sangat beragam. Begitu pula dengan ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, orientasi kultur kedaerahan serta pandangan hidupnya. Jika di urailebih terperinci, bangsa Indonesia memiliki talenta, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit, status ekonomi, kelas social, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, tingkat umur, profesi dan bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Tiap-tiap kategori sosial, masing-masing memiliki budaya internal sendiri, sehingga berbeda dengan kecendrungan budaya internal sendiri, sehingga berbeda dengan kecendrungan budaya internal kategori social yang lain. Bila dipetakan secara teoritis, bangsa Indonesia dari segi kultural maupun structural memantulkan

³¹ Departemen Agama RI, *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama Indonesia, Seri II* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), h. 128-129.

tingkat keragaman yang tinggi.³²

Secara teoritik terdapat beberapa faktor penyebab konflik sosial. Pertama, pada tataran makroskopik, konflik sosial disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah dalam segala bidang yang sentralistik dengan dampak ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembagian kue pembangunan. Kedua, pada tataran mikroskopik, konflik sosial bernuansa agama akibat adanya kebijakan yang kurang memperhatikan kehidupan sosial keagamaan masyarakat lokal.³³

Pluralisme berasal dari bahasa latin *Pluralis*, dari akar kata *Plur*, *Pluralis* yang berarti lebih dari satu atau jamak dari *Pluralisme*, berarti lebih dari suatu realitas fundamental.³⁴ Kondisi Kerukunan hidup beragama akan berubah menjadi konflik jika faktor-faktor penyebab konflik tidak diperhatikan oleh berbagai kelompok umat beragama maupun pemerintah. Konflik adalah sebuah kondisi yang berlawanan dengan integrasi yaitu suatu keadaan di manawarga bangsa atau masyarakat yang didalamnya ada dua pihak atau lebih yang berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing pihak disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai atau tuntutan dari masing-masing pihak. Kelompok keagamaan tertentu yang bersaing untuk memperebutkan jabatan secara paksa dalam suatu tujuan melahirkan reaksi dari kelompok keagamaan yang lain. Konflik terjadi karena adanya pemaksaan kehendak dari satu kelompok terhadap kelompok lain yang tidak dapat membuat kesepakatan bersama sehingga

³²Departemen Agama RI, *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama Indonesia, Seri II* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), h. 1.

³³Mursyid Ali, *Pemataan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2009), h.2

³⁴Tim Rosada, *Kamus Filsafat*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), h.225.

muncullah konflik berdarah.³⁵

Salah satu kenyataan kehidupan saat ini adalah adanya pluralitas dimasyarakat.teologi Islam sendiri di tegaskan, pluralism adalah suatu hal yang niscaya. Bahkan Islam menyebut pluralism sebagai salah satu bentuk *sunna tullah* (hukum alam), seperti *sunatullah* lainnya, misalnya beda pendapat yang kaya dan yang miskin. Pluralism juga amat dihargai dalam agama, dalam pandangan agama Islam seperti di tegaskan pemikiran tercerahkan, Muhammed Arkoun, Islam akan meraih kejayaannya jika umatnya membuka diri terhadap pluralism pemikiran, seperti pada masa awal Islam hingga abad pertengahan. Pluralism hanya bisa dicapai bila pemahaman agama dilandasi paham kemanusiaan sehingga umat Islam dapat bergaul dengan siapapun. Dengan mempertahankan pluralism, ujar Arkoun, seseorang akan tetap menjadi kritis. Itu sebabnya, lanjut Arkoun, Islam harus mempertahankan kebebasan bagi setiap Muslim untuk berpartisipasi dalam ijtihad.³⁶

Toleransi umat beragama menjadi aspek terpenting tradisi dialog antar agama. Dialog antar agama di sini berarti saling menghormati dan mengakui masing-masing kutub. Dialog juga sebagai manifestasi dari pluralitas kemajemukan ciptaan Tuhan. Dialog yang kita inginkan adalah dialog yang aktif dan membuahkan, bukan dialog pasif dan mandul. Dalam teologi Islam, model dialog yang demikian disebut “dialektik-dialogis” (*al-hiwar al-jadali*), yaitu dialog yang dimulai dari sikap memilih dari dua pendapat, setelah dikritik, “dibongkar”, dan direkonstruksi. Dialog disini mencari *common platform* (Kalimatu sawa/persamaan persepsi) dan *common*

³⁵ Mursyid Ali, *Pemataan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, h. 7.

³⁶ Irwan Suhanda, *Damai untuk Perdamaian* (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara 2006). H. 10.

denominator (titik temu).³⁷

Permasalahan di seputar rumah ibadah bukanlah permasalahan yang hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat kasus terkait rumah ibadah juga terjadi. People Bay menentang pembangunan masjid di kawasan Brooklyn Sheepshead Bay, New York dan rencana pembangunan masjid di Ground Zero yang katanya oleh para ahli kebebasan beragama itu merupakan salah satu hak dalam menjalankan ibadatnya tidak serta merta dengan gampang mendirikan bangunan tersebut di sana.

Pengaturan pendirian rumah ibadah bukanlah intervensi negara atau pemerintah terhadap agama, melainkan bersifat pengadministrasian semata. Hal ini tampak dalam PBM Bab IV tentang pendirian rumah Ibadat Pasal 14, sebagai berikut: "Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung." Selain memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat 1, bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: Daftar nama dan tanda tangan pembangunan rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang di sahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3). Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/Kepala desa, rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/Kota." Persyaratan yang tertera pada ayat (2) huruf a tidak terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah adat" (PBM No 9 dan 8 Tahun 2006).³⁸

Kegiatan keagamaan yang bersifat duniawi, sebagian rumah ibadah mengindikasikan adanya kontribusi bagi

³⁷ Irwan Suhanda, *Damai untuk Perdamaian*, h. 12

³⁸ Haidlor Ali Ahmad Dkk, *Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia*. h. 4.

peningkatan kerukunan. Hal ini terlihat dari fungsi-fungsi sosial yang diperankan oleh masing-masing rumah ibadah dengan melibatkan umat beragama lain, sekalipun dalam intensitas yang beragam. Sebagian rumah ibadah yang lain tidak begitu terlihat adanya kontribusi bagi peningkatan kerukunan antar umat beragama, karena kegiatan sosial yang dilakukan terbatas untuk intern umat beragama yang bersangkutan.

Rumah-rumah ibadah yang terlihat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerukunan berikut rincian kegiatan masing-masing adalah:

- a. Masjid Al Furqon Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jakarta, kegiatan sosial yang di lakukan antara lain:
 - 1) Menyelesaikan masalah umat akibat krisis ekonomi politik, sosial dan budaya yang di kelola oleh komite penanggulangan Krisis (KOMPAK).
 - 2) Menyediakan buku-buku keagamaan yang dapat di kunjungi oleh masyarakat tanpa memandang agama, dikelola oleh peprustakaan masjid.
 - 3) Menjual bermacam-macam buku keagamaan yang dapat dibeli oleh masyarakat umum tanpa memandang agama, di kelola oleh Toko Buku Media Dakwah.
 - 4) Membagikan daging Korban pada waktu Idul Qurban kepada penduduk yang miskin di sekitar masjid termasuk mereka yang non muslim.
- b. Gereja (Kristen) Bala Keselamatan Korps 11 Medan, kegiatan sosial yang di lakukan antara lain:
 - 1) Setiap bulan sekali membagikan bahan-bahan makanan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dengan Panti Asuhan Putera tanpa memandang agama. Bahan-bahan makanan yang merupakan stok kelebihan persediaan untu anak-anak asuh itu diberikan gereja

melalui Yayasan Panti Asuhan Puteri di bawah dikoordinasikan Gereja Bala Keselamatan Korps 11 Medan.

- 2) Menerima sumbangan baik berupa uang maupun bahan-bahan makanan dari organisasi/lembaga keagamaan maupun perorangan tanpa melihat agama. Sumbangan diterima melalui Yayasan Panti asuhan Putera ini sepenuhnya untuk menambah dana operasional panti asuhan.
- c. Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB), kegiatan sosial yang dilakukan antara lain:
- 1) Menyediakan tempat pendidikan/ilmu pengetahuan “Widya Pura” yang merupakan sarana persekolahan Gereja Kristen Bali. Tempat pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMU yang dilengkapi yang dilengkapi dengan asrama ini tidak hanya menampung anak-anak kristen, tetapi juga anak-anak dari Hindu dan lainnya. Anak didik yang di tamping diutamakan dari kalangan keluarga miskin.
 - 2) Menyediakan sekolah perhotelan, untuk mengimbangi meningkatnya pariwisata. Sekolah ini menampung mahasiswa yang kurang mampu tidak hanya dari kalangan umat kristiani. Sekolah yang kebanyakan mahasiswanya dari kalangan umat hindu ini di diberikan beasiswa.
 - 3) Menyelenggarakan kursus menjahit selama enam bulan yang diikuti oleh penduduk dari berbagai agama. Kursus yang sekitar 60 pesertanya terdiri atas orang Hindu dan Islam ini tanpa dipungut biaya.
 - 4) Memberikan pinjaman uang kepada masyarakat umum berupa usaha perkreditan dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Nasabah diutamakan para

pengusaha ekonomi lemah tanpa memandang agama mereka.³⁹

Program pembinaan kerukunan dimaksud dilakukan misalnya dengan memasukkan materi pesan-pesan kerukunan dalam berbagai khotbah atau ceramah agama yang dilakukan. Upaya ini dilakukan misalnya dengan cara membuat surat edaran kepada para pengelola rumah ibadah.

Bagi rumah ibadah yang dalam melakukan kegiatan sosial hanya melibatkan intern agamanya, di himbau agar dalam upaya mengembangkan kegiatan sosialnya melibatkan umat beragama lain sesuai kemampuan dan kondisi daerah atau lingkungan rumah ibadah masing-masing.⁴⁰

Mukti Ali mengatakan, bahwa "agama sebagai refleksi iman, tidak hanya terbatas pada kepercayaan saja, tetapi juga merefleksikan sejauh mana kepercayaan itu diungkapkan dalam dunia ini". Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya agama bersifat independen yang secara teoritis dapat mempengaruhi kenyataan sosial. Maka dari itu, agama mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk menentukan pola perilaku manusia dan bentuk struktur sosial. Namun kenyataannya, agama dan masyarakat saling pengaruh mempengaruhi. Agama mempengaruhi jalannya masyarakat. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan masyarakat mempengaruhi pemikiran terhadap agama.

Salah satu implementasi dari kehidupan beragama di masyarakat adalah dengan di bangunnya rumah-rumah ibadah dimana merupakan sarana keagamaan yang penting bagi

³⁹A. Hakim dan Moh. Saleh Isre, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslit-bang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departement Agama RI, 2004), h. 4-6.

⁴⁰A. Hakim dan Moh. Saleh Isre, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, h. 8-9.

pemeluk agama di suatu tempat. Selain berfungsi sebagai simbol keberadaan pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah.

3. *Pola Kerukunan Umat Beragama*

Kerukunan Antar umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun dan damai diantara sesama umat beragama di Indonesia, yaitu hubungan harmonis antara sesama umat seagama dan umat beragama yang berbeda agama serta antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat sejahtera lahir batin.⁴¹

Dibutuhkan pola bentuk atau model yang biasa dipakai sebagai dasar untuk membuat atau untuk menghasilkan pola suatu atau bagian dari sesuatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang di timbulkan cukup mempunyai suatu yang jenis untuk pola dasar yang dapat di tunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.⁴²

Secara *terminology*, menurut Frans Magnis Suseno Pola Kerukunan diartikan berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu dan kerjasama dalam aspek sosial, pengertian keadaan rukun merupakan suatu keberadaan semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat.⁴³

⁴¹ Departemen Agama, Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama, *Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta : 1997/1998), h 3.

⁴²<https://id.m.wikipedia.org>

⁴³Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Filsafati Tentang Kebijakan Hidup Jawa*(Jakarta:PT.Gramedia Utama,2001),h.39.

Dalam konteks Indonesia kerukunan umat beragama bisa di bentuk ketika budaya masyarakat mampu menciptakan sarana pertemuan di luar konteks agama. Pada posisi inilah dibutuhkan pelestarian arena interkasi umat dari berbagai agama secara alami. Ruang interkasi yang benar-benar tumbuh dari kesadaran umat beragama untuk berbaur dengan kelompok agama lain, bukan karena interkasi yang dipaksakan, pendekatan yang memungkinkan secara rasional dilakukan untuk memulihkan kerukunan yaitu melalui pendekatan budaya, lembaga dan pemerintah kerja sama tokoh agama dan masyarakat dan kerja sama masyarakat antar umat beragama itu sendiri.

Kerukunan umat beragama yang menjadi pilar pembangunan nasional sangat di butuhkan, akan tetapi persatuan nasional akan rentan ketika kondisi ekonomi, politik dan keamanan tidak sehat. Oleh sebab itu dibutuhkan pola untuk mewujudkan kerukunan dan persatuan nasional untuk memperbaiki stimulant pada semua.

Pemerintah dalam hal Departemen agama, berusaha dengan segala dana daya agar pengembangan dan penyiaran agama dapat memacu pelaksanaan pembangunan semua sector sehingga pembangunan dibidang agama merupakan bagian integral dalam Pembangunan Nasional Sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang, bahwa pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah memanfaatkan semaksimal mungkin modal dan potensi dalam negeri maka pembangunan di bidang agama ialah memanfaatkan semaksimal mungkin dana dan daya umat beragama Indonesia sendiri Oleh karena itu bantuan luar negeri untuk Pembangunan Agama hanya merupakan komponen pelengkap, yang pelaksanaannya perlu diarahkan sehingga benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain diharapkan dapat menumbuhkan

sikap “mandiri” di kalangan umat beragama.⁴⁴

Diperlukan penanganan yang sangat hati-hati sekali dalam masalah Agama, karena sebisa mungkin jangan sampai menyakitkan hati pemeluk agama lain. Masalah penyiaran agama tidaklah perlu sampai datang dari pintu ke pintu, rumah ke rumah kemudian menyuruh orang lain untuk mengikuti atau masuk ke agama yang mereka bawa. Memberikan janji-janji kemudian memberikan hasutan menjelek-jelekan agama lain. Hal inilah yang diatasi pemerintahan dalam penanganan bagaimana caranya penyiaran agama itu dilakukan dengan cara benar tanpa mengganggu kenyamanan agama lain.

Berikut adalah pembinaan kehidupan beragama yang sudah berkaitan dengan tiga prioritas nasional yaitu :

1. Pemantapan Pancasila sebagai Ideologi Falsafah Negara.
2. Pemantapan Stabilitas dan Ketahanan Nasional.
3. Kesenambungan Pembangunan Nasional.⁴⁵

Salah satu pilar untuk memperkokoh kerukunan nasional adalah mewujudkan kerukunan antarumat beragama dengan mengembangkan wawasan multikultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat dengan harapan terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, melainkan hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat pada keagamaan keyakinan, tradisi, adat, maupun budaya dan yang paling utama adalah berkembangnya sikap saling tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dari dalam ajaran agama

⁴⁴ Departemen Agama, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta : 1982), h. 60.

⁴⁵Departemen Agama, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta : 1982), h. 61.

masing-masing. Berikut adalah strategi untuk menciptakan suasana rukun pada kalangan umat beragama⁴⁶:

1. Membimbing umat beragama agar semakin meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana rukun, damai, baik intern maupun antarumat beragama.
2. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama.
3. Tidak memncampuri urusan akidah dan dogma dan ibadah suatu agama.
4. Negara dan Pemerintah membantu atau membimbing penunaian ajaran agama.
5. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan kesucian agama.
6. Pemerintah mendorong dan mengarahkan segenap komponen masyarakat untuk lebih meningkatkan kerjasama dan kemitraan seluruh lapangan kehidupan masyarakat, bukan untuk hegemoni dan penindasan oleh suatu kelompok kepada kelompok lainnya.
7. Mendorong umat beragama agar mampu mempraktekkan hidup rukun dalam bingkai pancasila, konstitusi dan dalam tata tertib hukum bersama.
8. Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan unsur masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset.
9. Meningkatkan pemberdayaan sumberdaya manusia untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat bawah.

⁴⁶ Said Agi Husin Al Munawar, *Fikh Hubungan Antar Agama* (Jakarta : Ciputat Press, 2005), h 16-17.

10. Fungsionalisasi pranata lokal, seperti adat istiadat dan norma-norma sosial yang mendukung upaya kerukunan
11. Mengundang partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing melalui kegiatan-kegiatan dialog, musyawarah, tatap muka, kerja sama sosial dan sebagainya.

Dengan demikian kerukunan yang wajib diupayakan adalah tidak mengurangi atau membatasi, melainkan justru diwujudkan dalam keseimbangan yang dinamis yaitu kebebasan yang tidak mematikan kebebasan. Sedangkan kerukunan dalam konteks kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yaitu tidak berkotak-kotak, berdasarkan ras, suku, agama, budaya dan lain-lain.

Penutup

Realitas kehidupan beragama di kabupaten Soppeng tercermin karena dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pola kerukunan Umat beragama di kabupaten Soppeng yaitu kerja sama antara sesama umat dan dengan saling menjaga dan menghormati penganut agama adanya peran penting tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang paham dan mengerti yang namanya perbedaan dan adanya lembaga pemerintah sebagai penunjang terciptanya kerukunan umat beragama, karena agama itu membawa kedamaian dan keselamatan bagi penganutnya, petunjuk tentang kerjasama dan saling menghargai sesama umat manusia dengan memahami dan menghayati ajaran agama karena agama membawa perdamaian. Selain itu, faktor pendukung kerukunan umat beragama di Kabupaten Soppeng memiliki

semboyang *Sipakalebbi, sipakatau dan sipakainge* artinya saling menghargai satu sama lain meskipun berbeda keyakinan, saling menghormati dan saling mengingatkan satu sama lain untuk mewujudkan kerukunan dan masyarakat yang harmonis. Terjadinya kerukunan umat beragama di Kabupaten Soppeng dikarenakan masyarakat paham dan mengerti bahwa agama membawa perdamaian bukan pertikaian, persepsi masyarakat dan tokoh agama tentang implementasi kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Soppeng menunjukkan sikap yang lebih toleran dilihat dari kerja sama dan interaksi dalam kesehariannya mereka mendahulukan sikap saling menghargai dan saling menghormati, saling membantu dalam hal-hal tertentu.

Daftar Pustaka

- Abulsyani. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial* (Cet. I; Jakarta: Fajar Agung, 1987).
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial* (Cet. II; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999).
- Al Munawar, said Aqil Husin. *Fikih Hubungan Antar Agama* (Cet.2; Jakarta; Ciputat Press, 2003).
- Ali, Mursyid. *Pemataan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2009).
- Alim, Muhammad. *Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konstisusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007).
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen

- Agama RI Badan Litbang dan Diklat Pulitbang Kehidupan Keagamaan, 2007).
- Departemen Agama RI, *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta : 1997/1998).
- Departemen Agama RI, *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama Indonesia, Seri II* (Jakarta: Departemen Agama, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta : 1982), h. 60.
- Gillin dan Gillin dalam Dirdjosiswo Soedjono. *Asas-asas Sosiologi* (Bandung: Armico, 1985).
- Hakim, A. dan Moh. Saleh Isre. *Fungsi Sosial Rumah Ibadahdari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslit-bang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departement Agama RI, 2004).
- Ibrahim, Jabal Tarik. *Sosiologi Pedesaan* (Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003).
- K.J, Veegar. *Realitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1983).
- Katu, Samiang dkk. *Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi (Ihalktiar mem ahalami agama dan menghalindari Konflik*.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia).
- Manafi. *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna).
- Maryam, Siti. *Damai dalam Budaya*, (Cet.1; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012).
- Mudhzar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

- Narwoko, J. Swi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Edisi ke-Empat, Cet. Ke-5; Jakarta: Kencana, 2011).
- Ritzer, George. & Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir, Teori Sosial Post Modern*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2012).
- Rosada, Tim. *Kamus Filsafat*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994).
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. 43; Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D* (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008).
- Suhanda, Irwan. *Damai untuk Perdamaian* (Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara 2006).
- Suroso, Asih.S. Gunawan. *Aspirasi Sosiologi* (Surakarta: CV Pustaka Manggala, 2006).
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Jawa Sebuah Analisa Filsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa* (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001).
- Winter dalam Samiang Katu dkk. *Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi (Ihalktiar memahami agama dan menghalindari Konflik)* (Makassar: Alauddin Press 2009).
- Wirawan, IB. *Teori-Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada 2012).